

RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN  
KERJA)

AKD: RUU OMNIBUS LAW (CIPTA LAPANGAN  
KERJA)

Bulan: Agustus 2020

Oleh:

GAMBAR

# **PERPUSTAKAAN DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: [perpustakaan@dpr.go.id](mailto:perpustakaan@dpr.go.id)

Web: [perpustakaan.dpr.go.id](http://perpustakaan.dpr.go.id)

LAPORAN WORLD BANK

## World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi

Muhamad Wildan, Minggu, 2 Agustus 2020, 06.01 WIB

JAKARTA, DDTCNews - World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Hal ini disampaikan oleh World Bank dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli ini dengan judul *Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery*. Tiga poin yang disorot oleh World Bank adalah klausul mengenai ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan.

"Revisi terhadap UU Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap pekerja," tulis World Bank dalam laporannya, dikutip Rabu (29/7/2020).

Baca Juga: [Wamenkeu: Skema PPh Final Kontruksi dan Real Estate Bakal Dievaluasi](#)

Menurut World Bank, skema upah minimum terbaru serta pembayaran pesangon yang lebih longgar dibandingkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja serta meningkatkan ketimpangan penerimaan.

Pada Pasal 88D, penentuan upah minimum yang akan ditetapkan hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang saat ini berlaku dimana upah minimum ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional.

Lebih lanjut, Pasal 88E juga mengatur industri padat karya bakal memiliki ketentuan upah minimum tersendiri menggunakan formula tertentu yang tidak diperinci pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga: [World Bank: Belum Ada Bukti Investasi di Indonesia Terhambat Tarif PPh](#)

Terakhir, ketentuan upah minimum tidak diberlakukan atas usaha mikro dan kecil. Pada Pasal 90B tertulis upah usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Yang jelas, kesepakatan upah harus berada di atas garis kemiskinan Badan Pusat Statistik.

Dalam aspek perizinan, World Bank menyorot klausul RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menghapuskan syarat dalam pemberian izin-izin dari kegiatan berisiko tinggi. Kegiatan seperti usaha farmasi, rumah sakit, pendirian bangunan tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan berisiko tinggi.

Dalam aspek lingkungan, direlaksasinya syarat-syarat perlindungan lingkungan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi mengganggu kehidupan masyarakat dan akan berdampak negatif terhadap investasi.

Baca Juga: [Perpanjangan Masa Insentif Pajak dan Usulan World Bank Terpopuler](#)

Secara umum, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan dan syarat-syarat terkait

lingkungan sesungguhnya tidak dihambat oleh regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan dan pemenuhan syarat-syarat terkait lingkungan.

Sisi positifnya, World Bank menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki potensi meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global atau *global value chain*.

Perizinan ekspor impor yang menggunakan pendekatan berbasis risiko bakal mengurangi biaya dan ketidakpastian dalam menyelenggarakan perdagangan internasional.

"Kewenangan perizinan ekspor impor yang digeser dari kementerian teknis kepada pemerintah pusat secara langsung berpotensi mengurangi praktik korupsi yang tersebar di berbagai kementerian," tulis World Bank. (Bsi)

Topik : [world bank](#), [Omnibus Law Cipta Kerja](#), [RUU Omnibus Law](#)

<b>JENIS</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>URL</b>
Berita	Baik Buruk Omnibus Law	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39784">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39784</a>
Berita	Finalisasi Omnibus Law: Isu Tenaga Kerja Belum Tuntas	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10628">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10628</a>
Berita	Ketenagakerjaan, "Omnibus Law", Libatkan Semua Pihak agar Beri Kepastian	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10713">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10713</a>
Berita	Omnibus Law & Efektivitas Penyaluran Kredit UMKM	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10679">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10679</a>
Berita	Omnibus Law 4.0 Vs Amdal	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10729">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10729</a>
Berita	Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Jalan Panjang Beleid Sapu Jagat	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10678">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10678</a>
Berita	Omnibus Law Solusi Tingkatkan Ekonomi Usai Pandemi Covid-19	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11040">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11040</a>
Berita	Omnibus Law, Pajak Spektrum Pajak E-dagang dalam "Omnibus Law"	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10647">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10647</a>
Berita	Omnibus Law, RUU Cipta Kerja Minim Mengantur Sektor Logistik	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10815">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10815</a>
Berita	Perpajakan, "Omnibus Law" dan Asas Teritorial Perpajakan	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10649">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10649</a>
Berita	RUU Cipta Kerja	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39787">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39787</a>
Berita	RUU Cipta Kerja Sektor Pelayaran, Omnibus Law Tak Sentuh Administrasi Pelabuhan	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10802">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10802</a>
Berita	Tanpa Mengubah Prinsip Lingkungan, Omnibus Law LHK Menyederhanakan Prosedur	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11967">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11967</a>
Berita	Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39866">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39866</a>
Berita	Tunda Pembahasan "Omnibus Law" di Masa Darurat Covid-19	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11005">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11005</a>
Berita	"Omnibus Law" Berperspektif Antikorupsi	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10811">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10811</a>
Jurnal	Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang	<a href="https://ejournal.balitbangham.ngo.id/index.php/kebijakan/arti\nicle/view/926">https://ejournal.balitbangham.ngo.id/index.php/kebijakan/arti\nicle/view/926</a>
Jurnal	Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahn Regulasi Pertanahan	<a href="https://rechtsvinding.bphn.go.\nid/ejournal/index.php/jrv/arti\nicle/view/378">https://rechtsvinding.bphn.go.\nid/ejournal/index.php/jrv/arti\nicle/view/378</a>
Jurnal	Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal	<a href="https://rechtsvinding.bphn.go.\nid/ejournal/index.php/jrv/arti\nicle/view/378">https://rechtsvinding.bphn.go.\nid/ejournal/index.php/jrv/arti\nicle/view/378</a>
Jurnal	Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi	<a href="http://e-jurnal.peraturan.go.i\nid/index.php/jli/article/view/6\n02">http://e-jurnal.peraturan.go.i\nid/index.php/jli/article/view/6\n02</a>
Jurnal	Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia	<a href="https://ejournal.uksw.edu/refl\neksihukum/article/view/3120">https://ejournal.uksw.edu/refl\neksihukum/article/view/3120</a>
Buku	Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=307\n21&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=307\n21&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=253\n48&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=253\n48&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Dilematika hukum ketenagakerjaan tinjauan politik hukum	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=275\n07&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=275\n07&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=304\n00&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=304\n00&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=304\n01&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=304\n01&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>

Buku	Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=304\n02&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=304\n02&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Hukum kerja : hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=238\n29&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=238\n29&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Hukum ketenagakerjaan	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=138\n58&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=138\n58&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=326\n93&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=326\n93&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Kesejahteraan	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=329\n59&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=329\n59&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=308\n04&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=308\n04&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=311\n30&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=311\n30&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=158\n21&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=158\n21&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=223\n58&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=223\n58&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Buku	Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=191\n72&amp;keywords=ketenagakerjaan">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=191\n72&amp;keywords=ketenagakerjaan</a>
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	<a href="https://peraturan.go.id/peratu\nran/view.html?id=11e44c4ebee7\n970b1a5313231363232">https://peraturan.go.id/peratu\nran/view.html?id=11e44c4ebee7\n970b1a5313231363232</a>
Undang-undang & Peraturan	Proses Pembahasan RUU tentang Ketenagakerjaan	<a href="http://www.dpr.go.id/arsip/ind\nexlg/id/126">http://www.dpr.go.id/arsip/ind\nexlg/id/126</a>
Undang-undang & Peraturan	RUU Cipta Kerja	<a href="https://cdn.cnbcindonesia.com/\nncbc/ruu-tentang-cipta-kerja.p\nndf">https://cdn.cnbcindonesia.com/\nncbc/ruu-tentang-cipta-kerja.p\nndf</a>
Undang-undang & Peraturan	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	<a href="https://store.kontan.co.id/mem\nber/history">https://store.kontan.co.id/mem\nber/history</a>
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<a href="http://www.dpr.go.id/jdih/inde\nx/id/196">http://www.dpr.go.id/jdih/inde\nx/id/196</a>